

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 73 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di  
Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMABANG  
ILIR 2016-2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. Unit kerja adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan pedoman penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten :
  - a. Sebagian acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
  - b. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  - c. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja.
- (2) Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU dan melaporkan kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten.

## BAB III PRINSIP PENETAPAN IKU

### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten harus selaras antar tingkatan unit kerja.
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (3) Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :
  - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum, dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
  - b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
  - c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

- d. Kebutuhan data statistik; dan
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

### BAB IV PENGUNAAN IKU

#### Pasal 7

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 8

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan IKU diberikan kewenangan kepada Bagian Organisasi untuk:

- a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

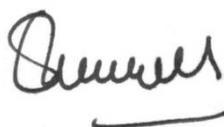
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 27 Desember 2016

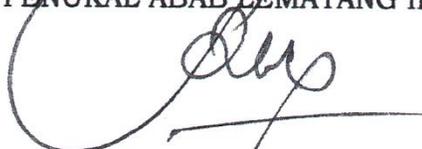
BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



**H. ROBBY KURNIAWAN , S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197906291998021002

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2016 NOMOR 67

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**VISI: PALI SERASI NIA (Penukal Abab Lematang Ilir Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis, Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman) 2021**

**Misi:**

1. Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdayasaing, yang ditunjang oleh keamanan yang kondusif;
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir berbasis sumber daya lokal;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (KDH)	Indikator Kinerja Utama (IKU) KDH	Penanggungjawab	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi rakyat	1.1	Presentase Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur	Meningkatnya Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase Jembatan dengan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum
		1.2	Peningkatan jumlah jaringan transportasi daerah secara terpadu	Tersedianya jaringan transportasi daerah secara terpadu	Jumlah rute transportasi umum	Dinas Perhubungan
					Jumlah armada angkutan umum	Dinas Perhubungan
		1.3	Peningkatan jumlah pembangunan prasarana dan sarana ekonomi	Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi	Jumlah pasar yang dibangun	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.4	Peningkatan jumlah pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Jumlah luas lahan pertanian yang dialiri	Dinas Pertanian
					Jumlah pelaku industri Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					tingkat kecepatan waktu pemberian izin usaha	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	2.1	Peningkatan kecepatan waktu pelayanan terpadu satu pintu	Meningkatnya kecepatan waktu pelayanan terpadu satu pintu	Realisasi PMDN	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.2	Peningkatan jumlah realisasi dan investor penanaman modal	Meningkatnya penanaman modal	Jumlah investor yang berinvestasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.3	Penurunan Jumlah kasus keamanan dan ketertiban masyarakat	Turunnya kasus keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja
		2.4	Penurunan jumlah kasus pelanggaran perda sebagai penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab	Meningkatnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab	Jumlah kasus pelanggaran perda	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (KDH)	Indikator Kinerja Utama (IKU) KDH	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	3.1 Peningkatan jumlah wirausaha baru dan presentase koperasi yang aktif	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Jumlah wirausaha baru persentase koperasi yang aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4.1 Peningkatan Jumlah/Presentase produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan tanaman pangan	Produksi padi	Dinas Pertanian
				Produktivitas padi	Dinas Pertanian
				Produksi karet	Dinas Pertanian
				Produktivitas karet	Dinas Pertanian
				Produksi sawit	Dinas Pertanian
				Produktivitas sawit	Dinas Pertanian
				luas kebun rakyat yang diberikan bibit karet unggul	Dinas Pertanian
				jumlah penyuluh pertanian	Dinas Pertanian
		4.2 Peningkatan Presentase penggunaan teknologi tepat guna	Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna	Persentase petani yang menggunakan teknologi tepat guna	Dinas Pertanian
		4.3 Peningkatan Jumlah produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan	jumlah ternak sapi	Dinas Perikanan
Produksi daging	Dinas Perikanan				
Jumlah ternak unggas	Dinas Perikanan				
Jumlah ternak kambing	Dinas Perikanan				
Jumlah Konsumsi Ikan perkapita	Dinas Perikanan				
5	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari industri kreatif dan pariwisata	5.1 Peningkatan jumlah tempat wisata dan wisatawan	Meningkatnya perkembangan industri kreatif dan pariwisata daerah	jumlah tempat wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	6.1 Penurunan persentase penduduk miskin	Menurunnya persentase penduduk kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Dinas Sosial
				Jumlah KUBE yang difasilitasi	Dinas Sosial
				Jumlah KK Penerima bantuan pangan	Dinas Sosial
		6.2 Peningkatan persentase kesempatan kerja/lapangan kerja baru bagi masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja/lapangan kerja baru bagi masyarakat	Presentase Tingkat pengangguran terbuka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (KDH)	Indikator Kinerja Utama (IKU) KDH	Penanggungjawab		
1	2	3	4	5	6		
7	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	7.1 Peningkatan jumlah perkembangan lembaga dan organisasi perempuan sebagai peran dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya perkembangan lembaga dan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan	DPPKBPPPA		
8	meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	8.1 Peningkatan jumlah perkembangan lembaga dan organisasi kepemudaan	Meningkatnya perkembangan lembaga dan organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
9	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	9.1 Peningkatan jumlah perusahaan yang mengolah limbah berbahaya dan beracun	Meningkatnya keterjagaan fungsi lingkungan	Jumlah perusahaan yang mengolah limbah berbahaya dan beracun	Dinas Lingkungan Hidup		
		9.2 Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan sampah	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup secara optimal	Jumlah Sarana dan prasarana pengolahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Pengembangan pengelolaan bank sampah	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata)	Dinas Lingkungan Hidup		
9.3 Peningkatan persentase rumah tangga yang teraliri listrik	Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik.	persentase rumah tangga yang teraliri listrik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
10	Meningkatnya kinerja pemerintahan	10.1 Peningkatan mutu/status laporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Status laporan keuangan daerah	BPKAD		
		10.2 Presentase Pengembangan Sistem Informasi pemerintahan/e-Government	Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan	Persentase website yang aktif	Dinas Komunikasi dan Informasi		
		10.3 Jumlah ketersediaan penyiaran Radio/TV Lokal	Meningkatnya saluran penyiaran Radio/TV Lokal	Jumlah saluran penyiaran Radio/TV Lokal	Dinas Komunikasi dan Informasi		
		10.4 Peningkatan kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain	Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain	persentase program yang berkesesuaian antara RPJMD dengan RKPD dalam rencana pembangunan	BAPPEDA		
11	meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional	11.1 Peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat pemerintah	Persentase pelanggaran disiplin PNS	BKPSDM		
				Jumlah diklat yang dilaksanakan	BKPSDM		
12	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	12.1 Peningkatan pengembangan sistem pelayanan dibidang pelayanan publik yang prima	Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil	Indeks kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah		
		12.2 Peningkatan jumlah penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	Jumlah gedung/kantor pemerintahan yang dibangun	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
				12.3 Peningkatan presentase kepemilikan KTP	Meningkatnya presentase kepemilikan dokumen kependudukan	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				12.4 Peningkatan presentase ketersediaan database kependudukan Kabupaten	Meningkatnya presentase ketersediaan database kependudukan Kabupaten	Presentase ketersediaan database kependudukan Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis (KDH)	Indikator Kinerja Utama (IKU) KDH	Penanggungjawab	
1	2	3	4	5	6	
		15.3	Peningkatan mutu kesehatan lingkungan pada rumah sehat	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase rumah sehat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan
					Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai antarpemeluk agama	16.1	Peningkatan ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama dengan bertambahnya jumlah pondok pesantren	Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama	jumlah pondok pesantren yang dibangun	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman/Kesra Setda
17	Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah	17.1	Peningkatan jumlah pembangunan gedung di bidang seni, budaya dan olah raga	Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan olah raga	Jumlah gedung seni dan budaya yang dibangun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase pemuda yang mendapat prestasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah Kegiatan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Jumah kelompok seni dan budaya yang dibina	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

H. HERI AMALINDO